



**PROSIDING
Konferensi Nasional
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia**

**Wawasan Nusantara: Studi Komparatif antara Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta di
Kawasan Jabodetabek**

**Arga Ilyasa, Arina Zulfa, Charen Nataly Katiandagho, Hanani Amiratul A. A., Monica
Angelina, Eko A. Meinarno**

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
arga.ilyasa@ui.ac.id

Abstrak

Wawasan nusantara merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sangat disayangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki wawasan nusantara yang rendah. Cara yang paling tepat untuk menanamkan konsep wawasan nusantara ini adalah dengan menyasar kelompok populasi yang paling banyak di Indonesia, yaitu pekerja. Pekerja ini dapat dibagi menjadi dua yaitu, pegawai negeri dan pegawai swasta. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2019), seluruh masyarakat Indonesia dihimbau untuk memahami wawasan nusantara, khususnya pegawai negeri. Para pegawai negeri wajib untuk memahami wawasan nusantara, sedangkan untuk masyarakat lainnya pemahaman akan wawasan nusantara hanya himbauan saja. Oleh karena itu, peneliti pun ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan wawasan nusantara antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Desain yang digunakan adalah *between subject design* yang membandingkan 2 kelompok. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berjudul “Skala Wawasan Nusantara” yang dikembangkan oleh Eko A. Meinarno dan Maharani Ardi Putri. Partisipan penelitian ini terdiri dari Pegawai Negeri (N=45) dan Pegawai Swasta (N=147) yang berasal dari kawasan Jabodetabek. Hasil penelitian ini menunjukkan wawasan nusantara pada Pegawai Negeri (N=45, M=5.17, SD=0.56) dan pegawai swasta (N=147, M=4.91, SD=0.61) berbeda secara signifikan ($p < 0.05$, *one tail*), dengan skor wawasan nusantara Pegawai Negeri lebih tinggi secara signifikan dibandingkan pegawai swasta. Namun, hasil dan diskusi lebih lanjut sangat diperlukan bagi penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Pegawai swasta, Pegawai Negeri, Wawasan nusantara

Pendahuluan

Globalisasi merupakan fenomena umum yang terjadi di seluruh dunia. Dengan adanya globalisasi, batas-batas antarnegara semakin samar. Tentu saja hal tersebut menawarkan baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif globalisasi adalah meningkatkan investasi karena lancarnya arus perekonomian antar negara (BBC, 2020). Sayangnya, lancarnya arus investasi ini menyebabkan efek samping bagi suatu negara, salah satunya adalah Indonesia. Contoh yang paling baru adalah kasus perusahaan Korea yaitu Korindo Group yang membakar hutan di Papua seluas kota Seoul (Amindoni & Henschke, 2020). Dampak negatif yang diciptakan oleh globalisasi tidak hanya dalam perekonomian tetapi juga hal lain seperti kebudayaan. Karena samarnya batas antar negara, sangatlah mudah bagi suatu negara untuk mengklaim kebudayaan dari negara lain. Hal ini telah dirasakan beberapa kali oleh Indonesia ketika Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia sebanyak 7 kali dalam kurun waktu lima tahun seperti kesenian Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange, batik, alat musik angklung, dan sebagainya (Akuntono, 2012).

Dalam rangka membentengi diri dari dampak negatif globalisasi, suatu negara harus berupaya keras tidak hanya tindakan kuratif seperti pemberian surat peringatan kepada negara lain tetapi juga tindakan preventif seperti peningkatan nasionalisme. Salah satu konsep yang berkaitan dengan nasionalisme agar kejadian tersebut tidak terulang lagi adalah wawasan nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Kemdikbud, 2020). Agar manfaat wawasan nusantara dapat dirasakan secara maksimal, sangat perlu untuk menyoar kelompok populasi yang memiliki jumlah paling banyak di Indonesia. Menurut BPS (2020), kelompok yang mendominasi penduduk di Indonesia adalah orang yang bekerja dengan jumlah 126,41 juta. Oleh karena itu, kelompok pekerja merupakan kelompok yang paling tepat untuk ditanamkan konsep wawasan nusantara.

Wawasan nusantara yang juga bagian dari wawasan kebangsaan ini penting untuk dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya Pegawai Negeri (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2019). Para pegawai negeri harus memahami dengan benar apa itu wawasan nusantara, bahkan salah satu syarat untuk menjadi pegawai negeri adalah mengikuti tes yang berkaitan dengan wawasan nusantara. Konsep ini penting untuk dipahami agar pegawai negeri mampu melaksanakan tugas dan jabatan dengan baik (Sammy dkk., 2017). Berdasarkan beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wawasan nusantara bagi seorang pegawai negeri adalah sebuah keharusan. Di sisi lain, kelompok pegawai swasta tidak diwajibkan untuk mengetahui wawasan nusantara.

Perbedaan pegawai pada konteks organisasi ini sering dibandingkan dalam penelitian. Terlihat dari beberapa penelitian yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara pegawai negeri dan pegawai swasta, mulai dari orientasi kerja, durasi kerja, perilaku kerja, norma, motif kerja, sikap kerja, hingga dampak yang diberikan kepada masyarakat (Snir & Harpaz, 2002; Bullock dkk., 2015). Snir dan Harpaz (2002), pada penelitiannya membuktikan bahwa pegawai negeri lebih mementingkan norma hak, bekerja dengan durasi lebih pendek, dan menganggap

bekerja adalah cara mereka untuk melayani masyarakat. Sedangkan pegawai swasta memiliki durasi kerja lebih lama dan lebih berorientasi pada ekonomi. Bullock dkk. (2015) juga melakukan studi komparatif antara pegawai negeri dan pegawai swasta di 30 negara. Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah ditemukan bahwa pegawai negeri cenderung untuk mempersepsikan bekerja sebagai usahanya untuk berkontribusi pada masyarakat dibandingkan dengan pegawai swasta. Namun, menurut Tim Peneliti UI-CSGAR (2019), PNS di Indonesia memiliki persepsi negatif dalam dimensi sikap pada konstruk profesionalisme.

Berkontribusi pada masyarakat ini adalah salah satu bentuk pengamalan dari wawasan nusantara. Menurut Rahayu (2007), wawasan nusantara memiliki arti yaitu, warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bertindak, bersikap untuk kepentingan bangsa, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan lembaga masyarakat. Berpikir, bertindak, dan bersikap untuk kepentingan bangsa ini bisa juga disebut dengan berkontribusi pada masyarakat. Dari kedua penelitian tersebut, peneliti memilih penelitian dari Bullock dkk., (2015) sebagai acuan.

Penelitian dari Bullock dkk. (2015) memiliki judul "*International Comparison of Public and Private Employees' Work Motives, Attitudes, and Perceived Rewards*". Seperti judulnya penelitian ini berskala internasional sehingga melibatkan 30 negara yang diperoleh dari *International Survey Programme*. Penelitian ini menunjukkan bahwa di sebagian besar negara yang diteliti juga ditemukan bahwa pegawai negeri tidak terlalu mementingkan gaji yang tinggi sebagai *reward* dan lebih menunjukkan komitmen pada organisasi. Kemudian, di semua negara yang diteliti, pegawai negeri cenderung untuk mempersepsikan dampak pada masyarakat sebagai *reward* yang mereka terima atau dengan kata lain mereka cenderung memprioritaskan dampak kepada masyarakat dan memiliki *public-service-oriented motives* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pegawai swasta.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan kontribusi pada masyarakat, yang mana disebut sebagai wawasan nusantara, pada pegawai negeri dan pegawai swasta yang ada di Jabodetabek. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok pekerja, akan pentingnya wawasan nusantara. Selain itu, dengan mengetahui adanya kecenderungan kelompok pegawai yang kurang memiliki wawasan nusantara, edukasi mengenai wawasan nusantara dapat lebih digalakkan.

Perbedaan pegawai pada konteks organisasi ini sering dibandingkan dalam penelitian. Terlihat dari beberapa penelitian yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara pegawai negeri dan pegawai swasta, mulai dari orientasi kerja, durasi kerja, perilaku kerja, norma, motif kerja, sikap kerja, hingga dampak yang diberikan kepada masyarakat (Snir & Harpaz, 2002; Bullock dkk., 2015). Snir dan Harpaz (2002), pada penelitiannya membuktikan bahwa pegawai negeri lebih mementingkan norma hak, bekerja dengan durasi lebih pendek, dan menganggap bekerja adalah cara mereka untuk melayani masyarakat. Sedangkan pegawai swasta memiliki durasi kerja lebih lama dan lebih berorientasi pada ekonomi. Bullock dkk. (2015) juga melakukan studi komparatif antara pegawai negeri dan pegawai swasta di 30 negara. Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah ditemukan bahwa pegawai negeri cenderung untuk mempersepsikan bekerja sebagai usahanya untuk berkontribusi pada masyarakat dibandingkan dengan pegawai swasta.

Namun, menurut Tim Peneliti UI-CSGAR (2019), PNS di Indonesia memiliki persepsi negatif dalam dimensi sikap pada konstruk profesionalisme.

Berkontribusi pada masyarakat ini adalah salah satu bentuk pengamalan dari wawasan nusantara. Menurut Rahayu (2007), wawasan nusantara memiliki arti yaitu, warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bertindak, bersikap untuk kepentingan bangsa, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan lembaga masyarakat. Berpikir, bertindak, dan bersikap untuk kepentingan bangsa ini bisa juga disebut dengan berkontribusi pada masyarakat. Dari kedua penelitian tersebut, peneliti memilih penelitian dari Bullock dkk., (2015) sebagai acuan.

Penelitian dari Bullock dkk. (2015) memiliki judul “*International Comparison of Public and Private Employees’ Work Motives, Attitudes, and Perceived Rewards*”. Seperti judulnya penelitian ini berskala internasional sehingga melibatkan 30 negara yang diperoleh dari *International Survey Programme*. Penelitian ini menunjukkan bahwa di sebagian besar negara yang diteliti juga ditemukan bahwa pegawai negeri tidak terlalu mementingkan gaji yang tinggi sebagai *reward* dan lebih menunjukkan komitmen pada organisasi. Kemudian, di semua negara yang diteliti, pegawai negeri cenderung untuk mempersepsikan dampak pada masyarakat sebagai *reward* yang mereka terima atau dengan kata lain mereka cenderung memprioritaskan dampak kepada masyarakat dan memiliki *public-service-oriented motives* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pegawai swasta.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan kontribusi pada masyarakat, yang mana disebut sebagai wawasan nusantara, pada pegawai negeri dan pegawai swasta yang ada di Jabodetabek. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok pekerja, akan pentingnya wawasan nusantara. Selain itu, dengan mengetahui adanya kecenderungan kelompok pegawai yang kurang memiliki wawasan nusantara, edukasi mengenai wawasan nusantara dapat lebih digalakkan.

Kajian Literatur

Jenis Pekerjaan

Pegawai atau pekerja atau buruh adalah makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama bagi setiap organisasi (Hidayati & Syamyudi, 2017). Pekerja atau pegawai adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Berdasarkan sektor organisasinya, pegawai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai negeri dan pegawai swasta. Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian nomor 43 tahun 1999, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pegawai swasta adalah seseorang yang bekerja untuk perusahaan swasta dan mendapatkan remunerasi regular seperti upah, gaji, komisi, tip, atau pembayaran sejenis

Kedua jenis pekerjaan ini memiliki beberapa perbedaan dalam beberapa aspek (Snir & Harpaz, 2002; Bullock dkk., 2015). Pegawai negeri terbukti lebih mementingkan norma hak mereka dibandingkan dengan pegawai swasta. Kemudian, pegawai swasta bekerja dengan orientasi pada ekonomi sedangkan pegawai negeri tidak. Karena pegawai negeri tidak berorientasi pada ekonomi maka mereka cenderung untuk tidak terfokus pada gaji yang mereka dapatkan sehingga mereka bekerja dalam durasi bekerja yang lebih pendek daripada pegawai swasta. Selain itu, pegawai negeri juga menganggap bahwa bekerja adalah cara mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat.

Alur rekrutmen kedua kelompok pegawai ini juga jelas berbeda. Rekrutmen perusahaan swasta biasanya dimulai dengan *screening curriculum vitae*, psikotes, wawancara dengan pihak HRD, dan diakhiri dengan *user interview* (Maulina, 2019). Lain halnya dengan rekrutmen pegawai negeri yang lebih rumit. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut pernyataan Badan Kepegawaian Negara yang dikutip dalam katadata.co.id (2020), alur rekrutmen dimulai dengan pendaftaran CPNS dan PPPK, lalu dilanjutkan dengan pengumuman administrasi. Jika pendaftar lolos administrasi, tahapan rekrutmen dilanjutkan dengan seleksi kemampuan dasar (SKD) yang terdiri dari kemampuan berhitung, pengetahuan umum, dan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan). Setelah mengikuti SDK dan mencapai *passing grade* yang telah ditentukan sebelumnya, calon pegawai negeri sipil diwajibkan untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) yang terdiri dari tiga tes yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Intelegensi Umum (TIU). Kisi-kisi dari SKD dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 24 tahun 2019. Alur rekrutmen untuk TNI dan Polri bahkan lebih rumit lagi karena disesuaikan dengan pangkat yang diinginkan (Polri dan TNI, 2020).

Wawasan Nusantara

Wawasan menggambarkan cara pandang atau cara melihat dari seorang individu. Nusantara berasal dari kata nusa (pulau atau kesatuan kepulauan) dan *antara* (berada di antara, diapit oleh, atau berada di tengah-tengah). Nusantara merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta di antara dua Samudra (Hindia dan Pasifik). Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Karena definisi inilah, wawasan nusantara dijadikan landasan geopolitik Indonesia (Menristek Dikti, 2016).

Wawasan nusantara lahir melalui deklarasi Djuanda yang menjelaskan lebar laut teritorial Indonesia 1 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Pasca deklarasi, pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang No 4 1960 tentang Perairan Indonesia, yang diperkuat dengan pasal DUA 5 A UUD bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-

batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ada kepentingan nasional yang merupakan turunan dari cita-cita, tujuan, dan visi nasional bangsa Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara (Menristek Dikti, 2016).

Unsur dasar wawasan nusantara ada tiga yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah (*content*) bermakna bahwa wawasan nusantara merupakan wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Sementara itu, isi (*content*) menandakan bahwa wawasan nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, hasil interaksi antara wadah dan isi yang disebut dengan tata laku (*conduct*) terdiri dari dua tata laku yaitu tata laku bathiniah dan tata laku lahiriyah. Tata laku Bathiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia sedangkan Tata laku Lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional (Menristekdikti, 2016).

Arah pandang wawasan nusantara terbagi menjadi dua bagian besar yaitu ke dalam dan ke luar. Untuk arah pandang ke dalam, bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Untuk arah pandang ke luar, bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional. Tujuan dari arah pandang ini adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia (Menristekdikti, 2016).

Dalam pembentukannya, wawasan nusantara terdiri dari beberapa asas. Asas yang pertama yaitu kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama memiliki makna bahwa warga negara Indonesia harus memiliki satu visi dan satu orientasi dalam memahami wawasan nusantara ini. Asas yang kedua adalah keadilan yang bermakna distribusi sumber daya dan hasil yang proporsional. Asas selanjutnya adalah yang memiliki makna bahwa terdapat kesesuaian antara kata dengan tindakan. Asas yang ke empat adalah solidaritas yang bermaksud bahwa seluruh elemen negara dapat saling berempati dan bersimpati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Asas yang ke lima adalah kerjasama yang memiliki definisi untuk harus bekerjasama secara strategis maupun taktis untuk mencapai tujuan bersama yaitu tujuan nasional. Asas yang terakhir adalah kesetiaan yang memiliki makna arti sebagai loyalitas dari

warga negara dan unsur-unsur negara terhadap kesepakatan-kesepakatan nasional yang telah dibuat semenjak bangsa Indonesia berdiri. Jika enam asas tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan akhir dari wawasan nusantara ini, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Menristekdikti, 2016).

Enam asas tersebut berhubungan erat dengan landasan wawasan nusantara secara idiil (pancasila) dan konstitusional (UUD 1945) yang lebih lanjut lagi dituangkan dalam Keppres MPR No. IV/MPR/1973, tentang garis besar haluan negara Bab II Sub E. Dengan ditetapkannya rumusan wawasan nusantara sebagai ketetapan MPR, maka wawasan nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggara negara, semua lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan hakikat rumusan wawasan nusantara. Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan persepsi yang sama diharapkan dapat membawa bangsa menuju kesepahaman dan kesehatan dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Dinamika Wawasan Nusantara pada Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta

Kesadaran berbangsa dan bernegara wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Jika wawasan nusantara dapat dihayati dan diamalkan dengan baik oleh seluruh warga negara Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka mereka akan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membuat warga negara Indonesia selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya dan selalu bersiap diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang berpotensi mengganggu stabilitas kewilayahan Indonesia.

Dalam mendukung tujuan, cita-cita, dan visi bangsa Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, khususnya pegawai negeri maupun pegawai swasta, baiknya memiliki pemahaman wawasan nusantara yang baik. Pegawai negeri (PNS, TNI, dan Polri) mengamalkan pentingnya wawasan nusantara dengan menjadikan pemahaman wawasan nusantara sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum bekerja yaitu dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Konsep ini penting untuk dipahami agar PNS mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatan dengan baik (Sammy, Sejati & Basseng, 2017). Pemahaman wawasan nusantara bagi seorang PNS adalah sebuah keharusan sedangkan bagi non-PNS, dimana didalamnya terdapat pegawai swasta, wawasan nusantara hanyalah sebuah himbauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan wawasan nusantara antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Berdasarkan studi literatur peneliti memiliki hipotesis bahwa pegawai negeri memiliki wawasan nusantara yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai swasta.

Metodologi

Partisipan

Populasi target penelitian ini adalah pegawai baik negeri maupun swasta. Partisipan penelitian ini adalah 96 pegawai di Jabodetabek yang dibagi menjadi 2 kelompok penelitian, yaitu pegawai negeri sipil (N=45) dan pegawai swasta (N=147). Karakteristik partisipan dalam penelitian ini adalah merupakan seorang pegawai negeri atau pegawai swasta baik laki-laki, perempuan, lainnya berusia 19-50 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan pendidikan minimal SMA/SMK. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. Peneliti menyebarkan kuesioner penelitian kepada partisipan yang memiliki karakteristik-karakteristik tersebut melalui aplikasi *chatting*, dan juga melalui media sosial, seperti *twitter* dan *instagram*.

Tabel 1. Partisipan Penelitian

	Pegawai Negeri	Pegawai Swasta
Jabodetabek	26	70

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *cross-cultural comparison* dengan desain penelitian *between subject design*, karena penelitian membandingkan dua kelompok penelitian. Peneliti melakukan kontrol terhadap variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, namun bukan variabel yang diteliti. Teknik kontrol konstansi dengan membatasi usia partisipan pada usia 19-50 tahun, membatasi pengalaman kerja partisipan minimal 1 tahun, dan tingkat pendidikan minimal SMA/SMK.

Alat Ukur

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur wawasan nusantara adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Meinarno dan Putri (2019) bernama Skala Wawasan Nusantara. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur empat dimensi implementasi wawasan nusantara yakni kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial-budaya, dan kesatuan keamanan (Tim Anas, dkk., 2017; Utoro, 1988). Item-item dari alat ukur ini terdiri dari 9 pernyataan yang mengukur kesatuan politik, 8 pernyataan yang mengukur kesatuan ekonomi, 5 pernyataan yang mengukur kesatuan sosial-budaya, dan 9 pernyataan yang mengukur kesatuan keamanan. Sehingga, total item alat ukur ini adalah 31 item berbentuk pernyataan. Pilihan jawaban yang tersedia pada setiap itemnya yaitu skala likert 6 poin (1= sangat tidak sesuai; 2= tidak sesuai; 3= agak tidak sesuai; 4= agak sesuai; 5= sesuai; 6= sangat sesuai). Berikut contoh item dari kuesioner ini :

Tabel 2. Contoh Item Kuesioner

Pernyataan	1	2	3	4	5	6
Saya merasa seluruh wilayah laut dan pulau di indonesia merupakan tempat tinggal saya						
Saya ingin dapat melaksanakan peraturan peraturan di Indonesia						

Prosedur Penelitian

Tahap Persiapan Penelitian

Dalam tahap persiapan penelitian, peneliti membuat formulir online dengan menggunakan google form. Formulir ini yang akan diberikan pada partisipan penelitian untuk tujuan mendapatkan data terkait partisipan dan mengukur wawasan nusantara partisipan yang terdiri dari para pegawai. Formulir online yang diberikan terdiri dari 6 bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan terkait penelitian dan informed consent. Bagian kedua berisi data diri partisipan yang terdiri dari nama atau inisial, usia, institusi, domisili, dan kontak yang dapat dihubungi. Bagian ketiga sampai keenam terdiri dari item-item yang mengukur kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial-budaya, dan kesatuan keamanan.

Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap pelaksanaan penelitian, peneliti membagikan kuesioner kepada orang-orang yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Dalam menyebarkan kuesioner, peneliti memanfaatkan media sosial seperti twitter dan instagram untuk mendapatkan partisipan yang diinginkan.

Analisis Statistik

Peneliti menggunakan software SPSS versi 20 untuk mengolah data partisipan. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah independent sample t-test. Independent measure dipilih dalam penelitian ini karena pengukuran akan dilakukan pada dua kelompok partisipan yang berbeda yaitu pegawai negeri dan pegawai swasta. Dalam penelitian ini, t-test digunakan untuk membandingkan skor wawasan nusantara antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Selain itu, peneliti juga melakukan teknik analisis deskriptif untuk mendapat gambaran terkait variabel yang diteliti seperti, modus, mean, median, dan standard deviation (SD).

Hasil

Tabel 3. Perbedaan Wawasan Nusantara Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta

Wawasan Nusantara	Pekerjaan						Sig.
	Pegawai Negeri			Pegawai Swasta			
	M	SD	N	M	SD	N	
	5.26	0.48	26	4.91	0.62	70	0.012

Berdasarkan tabel diatas dengan analisis menggunakan teknik t-test, dapat diketahui wawasan nusantara pada Pegawai Negeri (N=26, M=5.26, SD=0.48) dan pegawai swasta (N=70, M=4.91, SD=0.62) berbeda secara signifikan ($p < 0.05$, one tail). Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa skor wawasan nusantara Pegawai Negeri lebih tinggi secara signifikan dibandingkan pegawai swasta.

Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan wawasan nusantara antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Penelitian ini membandingkan apakah ada perbedaan wawasan nusantara antara pegawai negeri dengan pegawai swasta yang signifikan. Penelitian ini perlu dilakukan karena adanya berbagai ancaman yang bisa mencederai keutuhan rakyat Indonesia di mana mayoritas populasi, yaitu pekerja, seharusnya berperan besar untuk menghadapi ancaman tersebut.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa ada perbedaan wawasan nusantara yang signifikan antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Hal ini dapat terjadi karena pegawai negeri sipil diwajibkan mengikuti tes sebelum diterima di pekerjaan mereka (Tes Wawasan Kebangsaan) dan keseharian mereka yang seringkali berhubungan dengan aspek-aspek kenegaraan (Pegawai Negara, 2016). Lebih lanjut lagi, tes tersebut menguji wawasan nusantara mereka sehingga mereka harus mempelajarinya jika ingin menjadi pegawai negeri sipil. Di sisi lain, pegawai swasta tidak diwajibkan mengikuti tes serupa dan, sebagai warga negara Indonesia, mereka hanya dihimbau untuk memahami wawasan nusantara sehingga sedikit dari mereka yang memiliki wawasan nusantara tersebut (Negara, 2014). Selain itu, pegawai negeri merupakan pekerjaan yang orientasinya mengabdikan pada negara sehingga mereka lebih banyak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan negara. Hal ini menyebabkan sebagian besar pegawai negeri mengetahui hal-hal berkaitan dengan negara dikarenakan eksposur pekerjaannya tersebut.

Dengan mengetahui hasil perbedaan wawasan nusantara antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta, dapat diasumsikan bahwa pegawai negeri sipil di Jabodetabek memiliki wawasan nusantara yang baik karena diwajibkan untuk mengikuti tes wawasan nusantara dan pekerjaan sehari-hari mereka yang dekat dengan pengabdian negara dalam bentuk pelayanan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa tes CPNS (calon pegawai negeri sipil) dan pekerjaan sehari-hari mereka dalam melakukan pelayanan masyarakat dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan mengenai wawasan nusantara. Sebagai tambahan, penelitian ini juga membuktikan bahwa banyak warga negara Indonesia yang tidak mementingkan wawasan nusantara jika tidak dipaksa untuk mempelajarinya dan tidak mendapatkan eksposur terhadap pengabdian masyarakat padahal sudah sepatutnya warga negara Indonesia memiliki wawasan nusantara sebagai bentuk cinta tanah air.

Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian dengan topik yang baru dan jarang diteliti di Indonesia. Namun, hal ini menjadi kendala bagi peneliti untuk menemukan literatur dalam memperkaya tinjauan pustaka penelitian. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, partisipan dari penelitian ini didominasi oleh pegawai swasta. Dari 96 partisipan yang ada, pegawai swasta berjumlah 70

partisipan sedangkan pegawai negeri hanya berjumlah 26 partisipan. Ketidakseimbangan ini akan menyebabkan bias pada hasil perhitungan dimana hasil tersebut cenderung over-estimate pada kelompok partisipan berjumlah lebih sedikit (Springate, 2012). Kedua, penggalan informasi pada penelitian ini kurang mendalam. Hal ini dikarenakan strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang dapat menggali pemahaman yang mendalam, penelitian kuantitatif dengan desain komparatif seperti ini hanya melihat perbedaan skor yang ada pada kedua variabel. Ketiga, penelitian ini tidak mengontrol confounding variable yang mungkin terjadi seperti lama bekerja sebagai pegawai negeri, dan intensitas berkontak dengan masyarakat yang bisa berbeda-beda untuk masing-masing profesi. Asumsinya, semakin lama seseorang bekerja sebagai pegawai negeri dan semakin sering seseorang berinteraksi dengan masyarakat, semakin tinggi pula wawasan nusantaranya. Keempat, partisipan yang berpusat di jabodetabek dapat dijadikan catatan khusus dalam menggeneralisasi hasil penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan wawasan nusantara antara Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor wawasan nusantara Pegawai Negeri lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan skor wawasan nusantara Pegawai Swasta. Pegawai Negeri di Jabodetabek memiliki wawasan nusantara yang baik karena mereka diwajibkan untuk mengikuti tes wawasan nusantara (prasyarat mendapatkan pekerjaan) dan pekerjaan mereka sehari-hari lebih dekat dengan aspek-aspek kenegaraan. Saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah (1) menyeimbangkan jumlah partisipan kedua kelompok agar hasilnya dapat lebih dipertanggung jawabkan, (2) membuat penelitian lanjutan untuk mengetahui korelasi antara eksposur terhadap pelayanan masyarakat dan skor tes wawasan nusantara dengan tingkat wawasan nusantara pegawai negeri, (3) membuat penelitian lanjutan dengan mengontrol variabel telah berapa lama bekerja sebagai pegawai negeri dan intensitas pegawai berinteraksi dengan masyarakat, (4) membuat penelitian lanjutan yang lebih mendalam seperti peran wawasan nusantara pada ASN yang radikal dan ekstrem dalam berideologi, dan (5) penelitian selanjutnya dapat diperkecil lagi lingkupnya misalnya hanya di kawasan jabodetabek sehingga validitas internal yang dimiliki menjadi lebih tinggi. Jika ingin membuat penelitian dalam skala nasional, jumlah partisipan bisa lebih ditingkatkan.

Referensi

- Akunmoto, I. (2012). *Dalam 5 Tahun, Malaysia 7 Kali Klaim Budaya Indonesia*. Diambil dari: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2012/06/19/1747119/Dalam.5.Tahun.Malaysia.7.Kali.%2520Klaim.Budaya.Indonesia>
- Amindono, A. & Henschke, R. (2020). *Papua: Investigasi Ungkap Perusahaan Korsel 'sengaja' Membakar Lahan untuk Perluasan Lahan Sawit*. Diambil dari : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54720759>.

- Bullock, J., Stritch, J., & Rainey, H. (2015). International Comparison of Public and Private Employees' Work Motives, Attitudes, and Perceived Rewards. *Public Administration Review*, 75(3), 479-489. doi: 10.1111/puar.12356
- Hidayati, S., & Syamyudi, S. (2017). Analisis Kinerja Pegawai guna Menunjang Kinerja Organisasi dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 6(2), 65. doi: 10.30588/jmp.v6i2.303
- Kemenristek Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Meinarno, EA., Putri, MA., Fairuziana. (2019). *Isu-isu Kebangsaan dalam Ranah Psikologi Indonesia*. dalam *Psikologi Indonesia*. Penyunting Subhan El Hafiz dan Eko A Meinarno. Rajawali Pers.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara*. Jakarta, LAN.
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ruang Pegawai. (2016, August 25). *Plus minus & Perbedaan Pegawai Negeri Dan Pegawai Swasta!* RuangPegawai.com.<https://www.ruangpegawai.com/motivasi/plus-minus-pegawai-negeri-dan-pegawai-swasta-1184>
- Sammy, F., Sejati, T., & Basseng. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Simanungkalit, J. H. U. (2009). Faktor-faktor Determinan dalam penetapan Besaran Gaji Pegawai pada Perusahaan Swasta. *Widyariset*, 12(3), 1-8.
- Snir, R. and Harpaz, I. (2002), "The meaning of work for public sector vs private sector employees", in Vigoda, E. (Ed.), *Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis*, Marcel Dekker, New York, NY, pp. 119-38.
- Springate, S. D. (2012). The effect of sample size and bias on the reliability of estimates of error: a comparative study of Dahlberg's formula. *The European Journal of Orthodontics*, 34(2), 158-163.
- Tim Peneliti UI-CSGAR. (2019). *Indeks Persepsi Masyarakat tentang Profesionalitas dan Rebranding Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019*. Diambil dari: https://csgar.ui.ac.id/data/assets/publication/publication_l6tCsD.pdf